ABSTRAK

Kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang menodai harkat kemanusiaan dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Kasus kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan pertahunnya. Dampak kejahatan seksual terhadap anak yaitu akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat. Tujuan adanya penelitian di Kota Semarang, untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana pengaturan mengenai pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual saat ini? (2). Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual di Kota Semarang?

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau dapat dikatakan juga pendekatan hukum non-doktrinal adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual saat ini dapat dikatakan masih tercecer atau belum menyatu, maka dengan ini dibutuh peraturan perundang-undangan mengatur pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual dengan komprehensif, untuk mempermudah aparat penegak hukum dan lembaga lainnya dalam pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual. Implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual di 4 Lembaga yaitu Polrestabes Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, serta Yayasan Setara belum memenuhi hak anak korban kejahatan seksual. Lembaga tersebut menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pedoman pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual. Kendala yang dialami Pengadilan Negeri Semarang yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga dalam pemberian pendampingan pada tingkat pengadilan.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Anak Korban, Kejahatan Seksual.

Abstract

Sexual crime is a form of crime that tarnishes human dignity and is considered an extraordinary crime. Cases of sexual crimes against children have increased every year. The impact of sexual crimes against children is that it will give birth to prolonged trauma which can then give rise to unhealthy attitudes. The purpose of this research in the city of Semarang is to find out the implementation of fulfilling the rights of children who are victims of sexual crimes. The formulation of the problem in this study is (1). What are the arrangements regarding the fulfillment of the rights of children who are victims of sexual crimes at this time? (2). How is the implementation of fulfilling the rights of children who are victims of sexual crimes in the city of Semarang?

The methodology in this study uses an empirical juridical approach or it can be said that a non-doctrinal legal approach is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action every particular legal event that occurs in society. Regulations concerning the fulfillment of the rights of children victims of sexual crimes can be said to be scattered or not yet integrated, so with this, laws and regulations are needed to regulate the fulfillment of the rights of children victims of sexual crimes in a comprehensive manner, to make it easier for law enforcement officials and other institutions to fulfill the rights of children victims of crimes. sexual.

The implementation of fulfilling the rights of child victims of sexual crimes in 4 institutions, namely the Semarang Polrestabes, the Semarang District Attorney, the Semarang District Court, and the Setara Foundation have not fulfilled the rights of child victims of sexual crimes. The agency uses the Child Protection Act as a guideline for fulfilling the rights of child victims of sexual crimes. The obstacle experienced by the Semarang District Court was the lack of coordination between institutions in providing assistance at the court level.

Keywords: Fulfillment of Rights, Child Victims, Sexual Crime.